

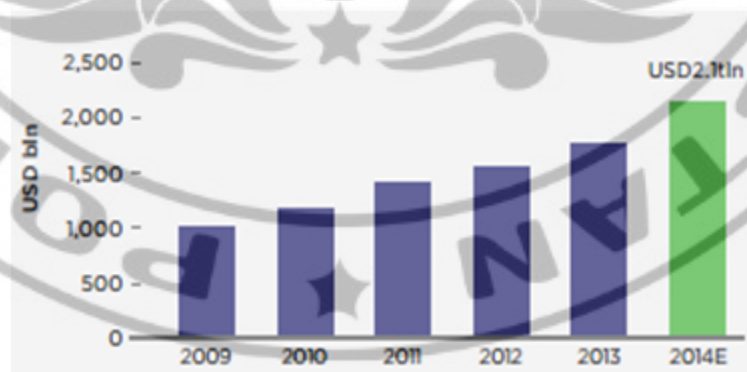
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam dekade terakhir, perkembangan ekonomi syariah di dunia menunjukkan *trend* peningkatan aset keuangan dari US \$ 200 miliar pada tahun 2003 menjadi sekitar US \$ 1,8 triliun pada akhir 2013 (IMF, April 2015). Dengan *Compounded Annual Growth Rate* (CAGR) sebesar 17,3% pertahun antara tahun 2009 sampai dengan 2014, angka tersebut mencapai US \$ 2,1 triliun pada akhir 2014 dan diekspektasi akan terus meningkat hingga mencapai US \$ 3,4 triliun pada akhir 2018 (MIFC, 2014). Perkembangan nilai aset keuangan syariah global dari tahun 2009 sampai dengan akhir tahun 2014 disajikan dalam Gambar I.1.

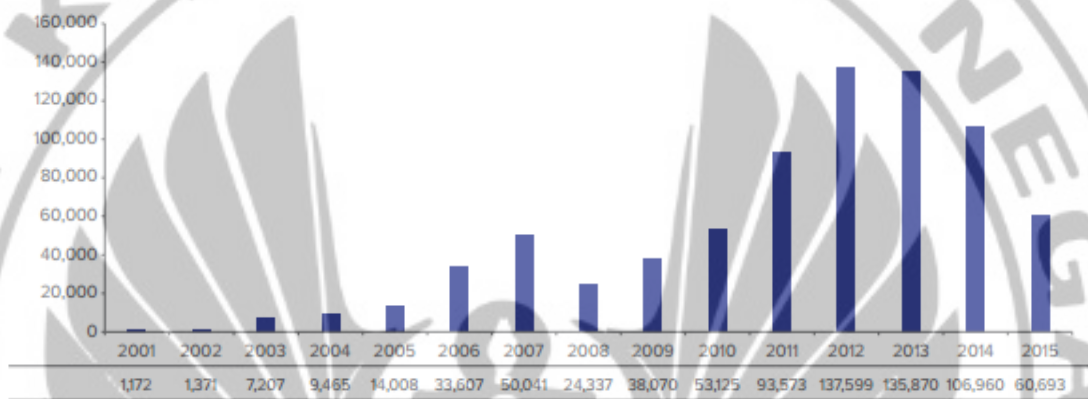
Gambar I.1 Nilai Aset Keuangan Syariah Global Tahun 2009 - 2014



Sumber: MIFC. 2014. *2014 - A Landmark Year For Global Islamic Finance Industry*. Bank Negara Malaysia. Hal 2.

Sukuk merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang paling sukses di industri keuangan syariah. Perkembangan Sukuk tidak hanya terjadi di negara-negara Timur Tengah maupun yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti Arab Saudi, Indonesia, Malaysia, Qatar, Bahrain, Brunei Darussalam, Turki, dan Pakistan, namun juga telah menarik minat negara-negara nonmuslim, seperti Jerman, USA, Jepang, China, United Kingdom, Canada, Rusia, Singapura, Hongkong, dan Gambia.

Gambar I.2 Penerbitan Sukuk Global



Sumber : Ahmed, *et al.* Hal 5.

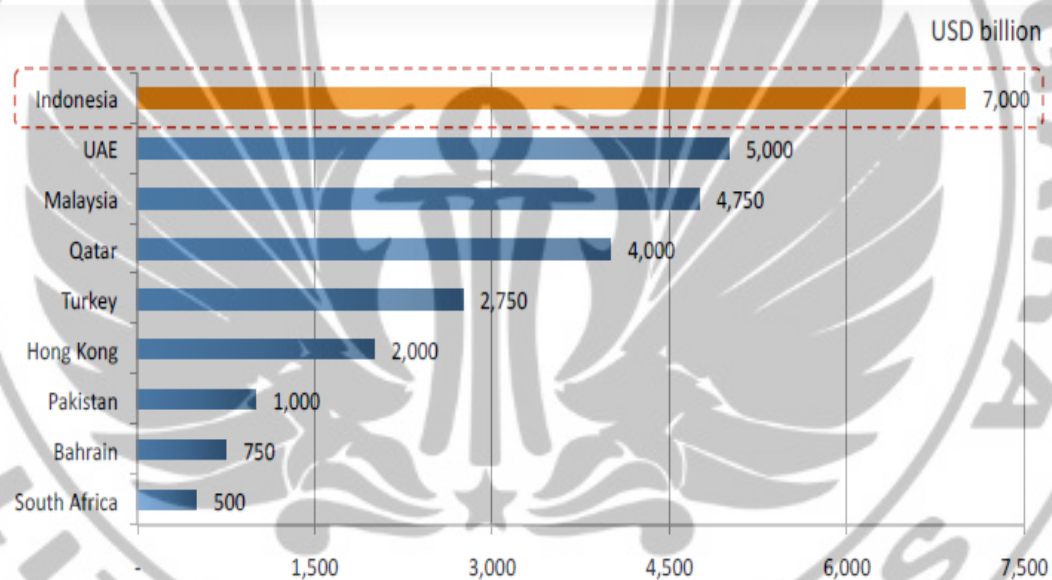
Perkembangan Sukuk di Indonesia diawali dengan dikeluarkannya fatwa Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah dan Nomor 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah pada tahun 2002 oleh Dewan Syari'ah Nasional. PT Indosat Tbk. merupakan perusahaan pertama yang menerbitkan obligasi syariah pada tahun 2002.

Pada tahun 2008, pemerintah menerbitkan Sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN dan sekaligus merupakan instrumen investasi bagi masyarakat berdasarkan Undang-undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Sebagai instrumen pembiayaan, dalam penerbitan SBSN, perikatan menggunakan prinsip syariah seperti keharusan adanya *underlying asset* baik berupa Barang Milik Negara (BMN) ataupun proyek/kegiatan APBN, menggunakan akad-akad syariah, serta memerlukan fatwa dan opini syariah dari pihak berwenang, dalam hal ini Dewan

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Sebagai instrumen investasi, SBSN merupakan produk investasi yang diterbitkan oleh pemerintah bagi investor institusi maupun individu yang aman dan menguntungkan. Aman, karena pembayaran imbalan dan pokok dijamin oleh negara untuk dibayarkan secara tepat waktu dan tepat jumlah. Pembayaran ini setiap tahunnya dialokasikan dalam APBN hingga jatuh tempo sehingga bebas dari risiko gagal bayar. Menguntungkan, karena SBSN memberikan imbalan yang kompetitif dan sebagian besar SBSN bersifat *tradable* di pasar sekunder sehingga *liquid* dan memungkinkan untuk diperolehnya *capital gain*.

Pada tahun 2015, Indonesia menjadi negara dengan jumlah *outstanding* Sukuk internasional terbesar di dunia. Posisi SBSN di pasar internasional dapat dilihat pada Gambar 1.3.

Gambar 1.3 SBSN di Pasar Internasional

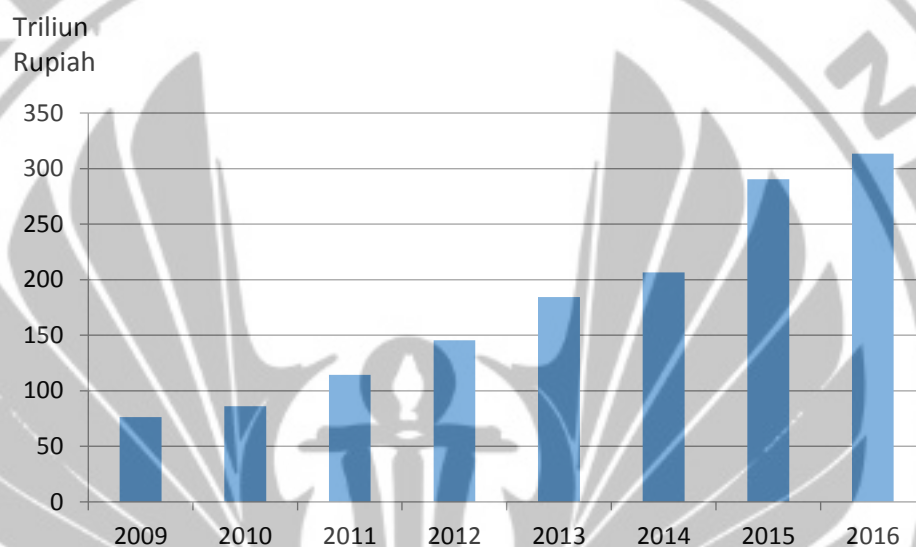


Sumber : Direktorat Pembiayaan Syariah, DJPPR, 2015

Sejak awal penerbitan oleh pemerintah, nilai penerbitan SBSN bertambah tiap tahunnya. Hingga tahun 2015, total penerbitan SBSN adalah Rp 377,04 Triliun dengan total *outstanding* Rp 286,56 Triliun (DJPPR, 2015). Nilai ini diproyeksikan akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembiayaan terutama di bidang infrastruktur. Hal ini sejalan dengan program Kabinet Kerja dan

tujuan keuangan syariah, yaitu mendorong berkembangnya sektor riil dan memberi *multiplier-effects* bagi pembangunan ekonomi. Estache dan Fay (2007) membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan cara yang efektif untuk kemajuan ekonomi, artinya kuantitas dan kualitas infrastruktur memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan berkorelasi negatif terhadap ketimpangan pendapatan.

Gambar I.4 Alokasi APBN untuk Infrastruktur



Sumber : diolah dari data Kementerian Keuangan, 2016

Menyoroti pembiayaan belanja publik dari perspektif Islam, Iqbal dan Khan (2004) berpendapat proyek *Build-Operate-Transfer* atau Bangun Guna Serah yang didasarkan pada struktur Sukuk memungkinkan negara berkembang memenuhi tuntutan likuiditas tanpa menggunakan metode pembiayaan berbasis bunga. Selanjutnya, pembiayaan belanja pemerintah melalui Sukuk yang didasarkan pada aset riil menjaga pengeluaran publik di bawah kendali karena ketersediaan pembiayaan tanpa aset berwujud akan menjadi terbatas. Akibatnya, negara-negara berkembang dapat mencapai tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi dalam mengelola unsur makroekonomi dan mikroekonomi dalam perekonomian

Berangkat dari pemikiran yang sama, Diaw, *et al* (2011) menyampaikan bahwa pemerintah biasa membiayai proyek-proyek infrastruktur melalui pembiayaan dengan utang konvensional. Namun, krisis utang yang terjadi secara berulang dalam beberapa dekade terakhir menekankan pentingnya manajemen utang dan perlunya alternatif pembiayaan lain. Sukuk merupakan alternatif yang memberikan banyak keuntungan berhubungan dengan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur pemerintah. Sukuk diharapkan meningkatkan soliditas pasar dan lembaga keuangan karena didasarkan pada aset berwujud sehingga memperkuat hubungan antara sektor riil dan sektor keuangan di perekonomian negara.

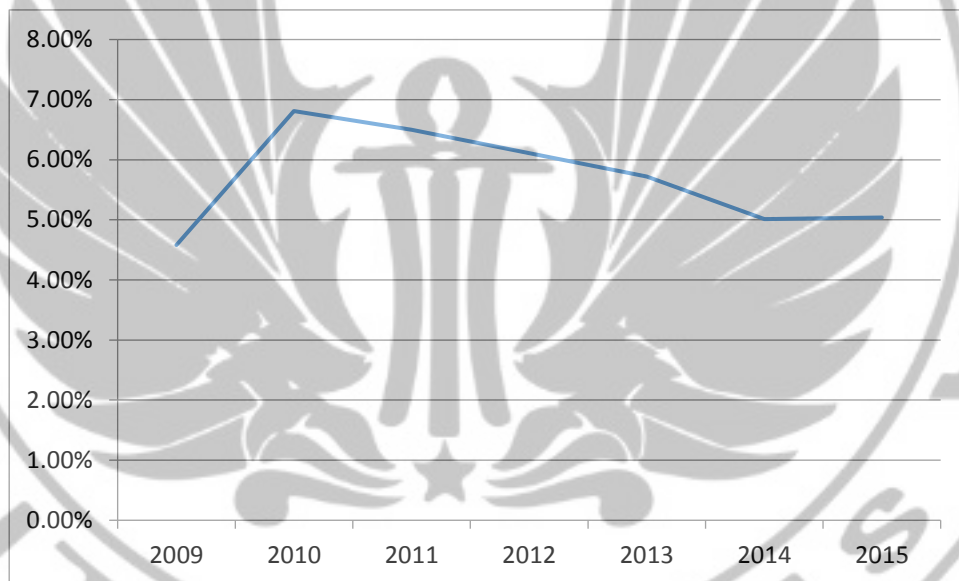
Pembangunan ekonomi memiliki cakupan yang sangat luas dan kompleks. Pembangunan ekonomi tidak hanya membahas mengenai perkembangan produk domestik bruto dan pendapatan nasional atau percepatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kepada modernisasi kegiatan ekonomi, seperti mulai adanya masalah mengenai pergeseran sektor pertanian menuju kepada sektor industri, upaya penghapusan atau pengurangan tingkat kemiskinan, penanggulangan ketimpangan tingkat pendapatan antara penduduk, dan penyediaan lapangan kerja dalam konteks yang terus berkembang, serta upaya untuk mengatasi keterbatasan pola pikir dari masyarakat negara-negara berkembang. Dalam skripsi ini, Penulis hanya akan membahas pembangunan ekonomi dalam lingkup yang lebih sempit, yaitu keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat.

Studi empiris yang membuktikan bahwa praktik Sukuk benar-benar berperan dalam keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat masih jarang ditemukan. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Rini dan Beik (2012) yang mengungkapkan bahwa penerbitan Sukuk memberikan dampak terhadap indikator makroekonomi Indonesia, terutama pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terbuka. Pemerintah dan korporasi selaku emiten menerbitkan Sukuk dengan tujuan memperoleh dana untuk melakukan perluasan usaha dan pembangunan infrastruktur yang pada akhirnya membuka lapangan pekerjaan baru yang dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penerbitan Sukuk juga berpotensi mempengaruhi jumlah uang beredar dan

inflasi jika pemerintah menjadikan Sukuk sebagai surat berharga yang dijadikan sebagai instrumen pada operasi pasar terbuka, selain SBI, SBIS, dan surat berharga pasar uang (SBPU) untuk menarik peredaran uang yang ada di masyarakat.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Malikov (2014) terhadap penerbitan Sukuk Negara di Malaysia dan Saudi Arabia yang memberikan kesimpulan bahwa penerbitan Sukuk Negara memiliki dampak positif dalam pembangunan ekonomi yang diukur dengan indikator ekonomi, keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat di dua negara tersebut. Artinya, penerbitan Sukuk Negara akan mendorong peningkatan indikator-indikator dimaksud. Namun, jika kita melihat kondisi ekonomi Indonesia beberapa tahun terakhir, faktanya tidak sejalan dengan hasil kedua penelitian tersebut.

Gambar 1.5 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2009 - 2015



Sumber : diolah dari data PDB BPS RI tahun 2009-2015

Dapat dilihat pada Gambar 1.5 bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2009 sampai dengan 2015 relatif belum stabil. Di tahun pertama setelah penerbitan SBSN, yaitu tahun 2009, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 4,58% yang ditengarai dipengaruhi oleh krisis global yang terjadi saat itu. Kondisi

pertumbuhan ekonomi membaik di tahun berikutnya, namun mengalami penurunan kembali di tahun-tahun setelahnya.

Berdasarkan uraian di atas, untuk mengetahui bagaimana Sukuk benar-benar berperan dalam keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, maka Penulis melakukan penelitian dengan judul : “ANALISIS PERBEDAAN KEUANGAN NEGARA DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEBELUM DAN SESUDAH PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA”

B. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia 8 (delapan) tahun sebelum penerbitan SBSN dan 8 (delapan) tahun sesudah penerbitan SBSN, yaitu dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2015.

Sejalan dengan penelitian oleh Musari (2013), penelitian ini hanya menggunakan data dari 12 (dua belas) indikator, yaitu 9 (sembilan) indikator kinerja keuangan negara dan 3 (tiga) indikator kesejahteraan masyarakat untuk mengidentifikasi dampak SBSN terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia, sebagai berikut :

Indikator kinerja keuangan negara :

- 1) Rasio pendapatan dalam negeri (*domestic revenues*) terhadap APBN (*state budget*);
- 2) Rasio APBN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Bruto* (GDP);
- 3) Rasio Pembayaran Utang atau *Debt of Service Ratio (DSR)*;
- 4) Utang per kapita (*Debt per capita*);
- 5) Rasio Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) atau *Balance of Payment* (BOP) terhadap PDB;
- 6) Rasio surplus/defisit APBN terhadap PDB;
- 7) PDB per kapita;
- 8) Rasio utang terhadap PDB;
- 9) Cadangan devisa (*Official reserves*).

Indikator kesejahteraan masyarakat :

- 10) Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*);
- 11) Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index*);
- 12) Zakat, infaq, dan sedeqah (ZIS) per kapita.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah : Bagaimana perbedaan keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia sebelum dan sesudah penerbitan SBSN?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia sebelum dan sesudah penerbitan SBSN.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya serta bidang ekonomi dan keuangan Islam pada khususnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan studi empiris untuk menentukan apakah terdapat perbedaan dalam keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia sebelum dan sesudah penerbitan Sukuk Negara atau SBSN.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah, terutama Kementerian Keuangan yang merupakan perumus, pengambil dan pelaksana keputusan terkait kebijakan pengelolaan pembiayaan, pada saat merumuskan kebijakan terkait penerbitan Sukuk Negara atau SBSN dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi Indonesia, terutama di lingkup keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi serta dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian sejenis yang dilakukan selanjutnya.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam lima bab dan tiap bab terbagi dalam beberapa subbab dengan urutan penyajian dan isinya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pengantar menuju pembahasan permasalahan. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang penelitian, ruang lingkup dan batasan penelitian, permasalahan dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan yang menggambarkan garis besar/pokok-pokok pembahasan secara menyeluruh.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini penulis menguraikan teori-teori yang melandasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian, penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, kerangka pemikiran serta hipotesis dan variabel penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai gambaran umum objek dan alasan pemilihan objek penelitian, jenis data yang digunakan, definisi operasional, metode pengumpulan data serta metode pengolahan data, yang terdiri dari alat untuk mengolah data dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menjabarkan mengenai hasil pengumpulan data, hasil pengolahan data dan pengujian hipotesis, serta pembahasan terhadap hasil dimaksud.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi, di mana penulis akan membuat kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab IV serta memberikan saran-saran kepada pihak yang berkepentingan.